

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KOTA BITUNG

Chuang Young Shyang Jonathan¹, Fanley Pangemanan², Welly Waworundeng³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi

Email Korespondensi: chuangjonathan28@gmail.com

Email: fanleypangemanan@unsrat.ac.id; wellywaworundeng@unsrat.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Fisheries and Marine Investment Policy in Bitung City. Investment policies generally aim to improve the overall investment climate, while investment promotion strategies have more measurable objectives that refer to the target amount of foreign investment a country or region wishes to attract within a specific timeframe. In an effort to increase the number of investors in Bitung City, the Bitung City government issued Regional Regulation No. 11 of 2019 concerning the Provision of Incentives and Facilitation of Investment to the Community and Investors in 2019. Investment growth in the fisheries sector in Bitung City still faces obstacles, with the number of investors remaining insignificant despite regulations facilitating investment in Bitung City, particularly investment from foreign capital or large companies, which are significantly outnumbered by small businesses operating in the fisheries sector. This study used qualitative research methods. The results indicate that the implementation of investment policies, particularly in the fisheries sector, is generally progressing well, but it requires resource support, particularly a sufficient budget, for its development.

Keywords: Implementation, Policy, Investment, Fisheries.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Investasi Perikanan Dan Kelautan Di Kota Bitung di Kota Bitung. Kebijakan investasi umumnya bertujuan meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan, sementara strategi promosi investasi memiliki tujuan yang lebih terukur yang mengacu pada jumlah target penanaman modal asing yang hendak diperoleh suatu negara atau wilayah dalam waktu tertentu. Dalam upaya meningkatkan jumlah investor berinvestasi di Kota Bitung pada tahun 2019 pemerintah kota bitung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat Dan Investor. pertumbuhan investasi di sektor perikanan di Kota Bitung masih mengalami hambatan di mana jumlah investor yang masuk tidak begitu signifikan meskipun sudah ada regulasi yang memudahkan investasi di Kota Bitung terutama investasi dari Modal Asing atau Perusahaan yang besar yang jumlahnya berbanding jauh dengan usaha kecil yang bergerak di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan secara umum pelaksanaan kebijakan investasi khususnya di bidang perikanan berjalan dengan baik namun dibutuhkan dukungan sumberdaya khususnya anggaran yang cukup untuk pengembangannya.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Investasi, Perikanan.

PENDAHULUAN

Kebijakan investasi umumnya bertujuan meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan, sementara strategi promosi investasi memiliki tujuan yang lebih terukur yang mengacu pada jumlah target PMA yang hendak diperoleh suatu negara atau wilayah dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, strategi promosi investasi tidak mencakup kebijakan; namun lebih mencakup modalitas dan perangkat yang nyata untuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

377

Indexed



SINTA 4



mempromosikan, menarik, dan memfasilitasi PMA. Penanaman Modal Asing atau (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kota Bitung, Sulawesi Utara, dikenal dengan potensi perikananannya yang melimpah. Potensi ini kini kembali menarik perhatian investor asing, menjanjikan kebangkitan sektor perikanan daerah tersebut. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan investor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Bitung aktif berupaya mengembangkan sektor perikanan sebagai andalan perekonomian daerah. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama strategis dengan berbagai pihak, termasuk investor asing.

Pemerintah Daerah Kota Bitung dalam upaya peningkatan investasi di daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung melakukan berbagai strategi seperti mempresentasikan berbagai potensi dan peluang investasi yang ada di Kota Bitung khususnya di sektor perikanan. Pada Bulan Mei 2025, Pemerintah Kota Bitung telah membuka pintu bagi investor asing, khususnya di sektor perikanan. Hal ini terlihat dari kunjungan dan rencana investasi dari investor asal Taiwan. Walikota Bitung, Maurits Mantiri, menyatakan bahwa Mr. Johny Chen dan Mr. William Hzu dari Taipei Trade and Economic Office (TETO) telah bertemu langsung dengan Pemkot Bitung untuk membahas peluang investasi. Kunjungan ini menandakan minat investor Taiwan untuk kembali berinvestasi di Bitung setelah sempat terhenti. (garudaonline.com).

Berdasarkan data awal penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung bahwa nilai realisasi investasi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berinvestasi di Kota Bitung ada tahun 2023 mencapai Rp. 4.261.119.771.299 meningkat sebesar Rp. 1.469.684.160.299 atau naik sebesar 52,65% dari realisasi investasi tahun 2024 yang berjumlah Rp. 2.791.435.611.000.

Dalam upaya meningkatkan jumlah investor berinvestasi di Kota Bitung pada tahun 2019 pemerintah kota bitung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat Dan Investor. Dalam Pasal 22 Perda tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Kota memberikan kemudahan investasi dapat berbentuk : a. penyediaan data dan informasi peluang investasi; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi.

Selain itu dalam Pasal 38 perda tersebut menyebutkan bahwa Jenis usaha atau kegiatan investasi yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan dalam KEK adalah : a. usaha perikanan; b. usaha pertanian; c. usaha farmasi; d. usaha logistik; dan e. usaha lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat salah satu prioritas utama jenis usaha yang didukung oleh pemerintah Adalah sektor perikanan. Pertumbuhan investasi di sektor perikanan Bitung dipengaruhi oleh pengembangan Eco Fishing Port dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang membuka peluang besar bagi investor, terutama dalam penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, dan logistik. Bitung memiliki potensi sumber daya perikanan melimpah, didukung infrastruktur yang terus ditingkatkan seperti pelabuhan dan jalur ekspor.

Namun dari pengamatan sementara peneliti dilapangan terkait pertumbuhan investasi di sektor perikanan di Kota Bitung masih mengalami hambatan di mana jumlah investor yang masuk tidak begitu signifikan meskipun sudah ada regulasi yang memudahkan investasi di Kota Bitung terutama investasi dari Modal Asing atau Perusahaan yang besar yang jumlahnya berbanding jauh dengan usaha kecil yang bergerak di sektor perikanan di mana data awal peneliti terdapat jumlah Perusahaan besar yang bergerak di sektor perikanan Kota Bitung dengan jumlah 18 perusahaan.

Pada tahun 2024, Kota Bitung memiliki 2.417 Usaha Industri Mikro dan Kecil (UMK) di sektor perikanan, seperti yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Angka ini menunjukkan bahwa Bitung Adalah pusat industri perikanan dengan banyak usaha kecil yang aktif di

dalamnya. Data ini dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan jumlah usaha yang termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil, yang sering kali terkait erat dengan kegiatan perikanan, terutama dengan fokus pada pengolahan ikan. (sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung)

Peneliti melihat beberapa Permasalahan utama pertumbuhan investasi sektor perikanan di Kota Bitung meliputi pasokan bahan baku yang belum mencukupi, biaya produksi yang tinggi, infrastruktur dan teknologi penangkapan yang terbatas, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Tantangan lain termasuk kualitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan terhadap illegal fishing, dan ketidakpastian kebijakan fiskal ekspor yang membuat investasi kurang menarik dibandingkan negara pesaing.

Selain permasalahan tersebut, sektor perikanan dan kelautan di Kota Bitung belum sepenuhnya dikenal secara nasional maupun internasional. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintahan Saat ini antara lain adalah, media informasi yang terbatas, data atau informasi yang belum terintegrasi, dan kurangnya informasi terkait dengan perkembangan Perekonomi di Industri maupun Sektor Perikanan di Kota Bitung. Itulah sebabnya hal-hal seperti ini, menyebabkan kurangnya optimal pemanfaatan teknologi informasi yang belum sepenuhnya digunakan dengan baik oleh pemerintahan. Selain itu adanya keluhan dari beberapa investor akan lambanya birkorasi investasi di Kota Bitung, koordinasi antar Lembaga yang belum maksimal dan regulasi yang berubah-ubah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi. Meskipun disematkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi. Meskipun disematkan sebagai daerah penghasil ikan cakalang terbesar di Sulawesi Utara, kinerja pemerintah dalam memaksimalkan potensi sektor perikanan dan kelautan masih terhambat. Lambatnya penyebaran informasi kepada masyarakat dan pengelolaan informasi yang belum terintegrasi dengan baik menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor ini.

Kondisi ini sangat disayangkan mengingat Kota Bitung memiliki sumber daya dan potensi yang ideal untuk menjadi pusat ekonomi maritim yang menarik bagi masyarakat dari luar Sulawesi Utara. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan media massa untuk mengoptimalkan promosi sektor perikanan dan kelautan, sehingga menjadikan tempat yang ideal untuk sumber potensi dan daya tarik masyarakat dari daerah luar Sulut untuk berkumpul dan menjadikan tempat penggerak ekonomi utama di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam pemahamannya yaitu data yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Menurut Moleong (2006) adapun fokus dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji penerapan kebijakan investasi di sektor perikanan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kota Bitung dengan menggunakan Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2022:122) yang berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam faktor utama yang saling berhubungan yakni:

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya Kebijakan
3. Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik
4. Komunikasi Antar Organisasi
5. Karakteristik Agen Pelaksana
6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Menurut Lofland dalam Moleong (2006), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data adalah data primer dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

379

Indexed



SINTA 4



data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang umum digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2001). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data kombinasi, antara lain sebagai berikut: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, standar dan sasaran kebijakan investasi perikanan dan kelautan di Kota Bitung telah dirumuskan secara jelas oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan serta arah kebijakan yang fokus pada peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif pemerintah, kebijakan ini dirancang untuk menjadikan Kota Bitung sebagai pusat industri perikanan terpadu. Hal ini sejalan dengan potensi daerah yang memiliki sumber daya laut yang melimpah. Pengusaha juga mengakui bahwa kebijakan investasi sudah memiliki arah yang jelas, terutama dalam memberikan kemudahan perizinan dan menarik investor.

Namun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan masih rendah. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui adanya aktivitas investasi, tetapi tidak memahami tujuan dan manfaat kebijakan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pihak yang terdampak.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, kejelasan standar dan sasaran kebijakan merupakan syarat penting dalam keberhasilan implementasi. Meskipun secara formal kebijakan sudah jelas, namun secara substantif belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh aktor, khususnya masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya gap antara kebijakan normatif dan pemahaman publik, yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi.

Selain itu, dari sisi pelaku usaha, masih ditemukan bahwa prosedur teknis dalam perizinan belum sepenuhnya sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sasaran kebijakan sudah jelas, namun dalam tahap operasionalisasi masih terdapat hambatan administratif yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel standar dan sasaran kebijakan sudah terpenuhi secara konseptual, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi praktis dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sumber daya yang sudah cukup baik, namun dari sisi sumber daya manusia perlu ada peningkatan kualitas, dari sisi anggaran cukup untuk mendanai operasional kantor DPMPTSP Kota Bitung, dan sarana prasarana pendukung sudah memadai. Dari sisi pemerintah, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang investasi perikanan menjadi kendala utama. Aparatur yang ada dinilai memiliki komitmen yang baik, namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Dari sisi pengusaha, keterbatasan tenaga kerja terampil juga menjadi permasalahan. Industri perikanan modern membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus, namun ketersediaannya masih terbatas. Hal ini berdampak pada produktivitas dan kualitas hasil produksi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi implementasi kebijakan, terutama dalam hal promosi investasi dan pengembangan sistem digital pelayanan perizinan namun hal tersebut dapat diatasi oleh pemerintah daerah. Sarana dan prasarana seperti system pelayanan, pendaftaran dan juga perizinan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dari hasil penelusuran data sekunder dari dinas DPMPTSP Kota Bitung, terjadi penurunan jumlah

anggaran dari tahun 2022-2024 namun tidak begitu signifikan dan tidak mengganggu pelayanan dari DPMPTSP Kota Bitung:

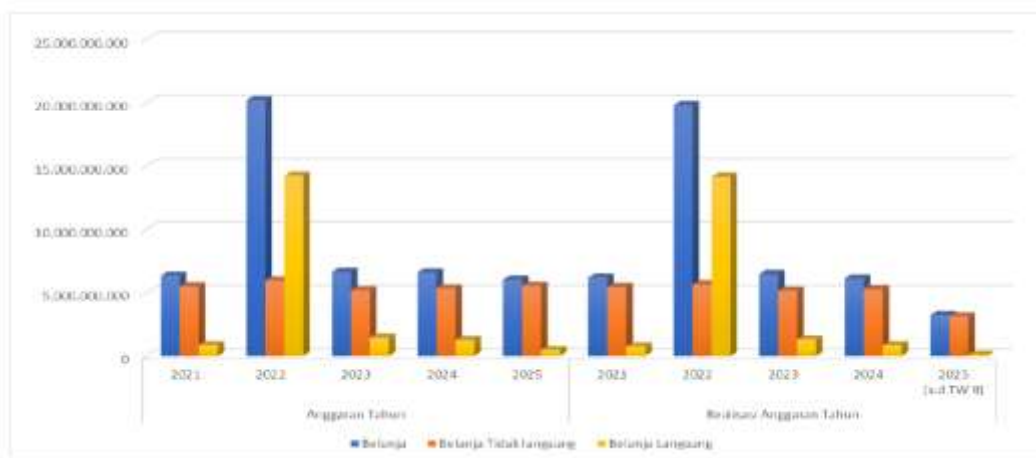
Tabel 1: Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2021 s.d 2025 Triwulan II

Unsur	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Realisasi Anggaran Tahun					Rata-rata Perumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021 (s.d TW II)	2022	2023	2024	2025 (s.d TW II)	Anggaran	Realisasi
Belanja	6.282.917.472	20.177.377.040	6.431.295.980	6.990.896.416	6.015.074.242	6.183.881.027	19.791.737.229	6.480.116.295	6.119.872.230	3.229.626.940	97%	98%	97%	95%	94%	9.185.922.916	18%
Belanja Tidak Langsung	5.480.336.937	5.948.034.668	3.182.087.777	3.339.328.938	3.039.452.492	3.436.980.101	6.641.301.099	3.188.323.193	5.272.047.934	3.130.294.527	99%	99%	98,0%	99%	97%	5.930.548.256	18%
Belanja Langsung	859.530.753	14.229.342.400	1.449.208.203	1.251.367.478	475.621.750	747.102.896	14.150.436.130	1.302.293.100	847.904.296	39.421.413	97%	99%	99%	96%	21%	3.255.374.660	19%

Sumber: Kantor DPMPTSP Kota Bitung. 2026

Dari tabel diatas, diperjelas dengan tabel berikut terkait sumber daya anggaran:

Gambar 1: Grafik Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2021 s.d 2025 Triwulan II



Sumber: Kantor DPMPTSP Kota Bitung. 2026

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, kecukupan sumber daya sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum didukung oleh kapasitas yang memadai.

Kondisi ini mengakibatkan beberapa dampak, antara lain:

- Proses perizinan yang kurang optimal
- Kurangnya daya saing investasi
- Terbatasnya pengembangan industri perikanan

Dengan demikian, sumber daya dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan investasi perikanan dan kelautan di Kota Bitung.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi lingkungan eksternal memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ekonomi dan politik di Kota Bitung relatif mendukung, namun kondisi sosial masih menjadi tantangan. Dari sisi ekonomi, Kota Bitung memiliki potensi besar di sektor

perikanan dan kelautan. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi investor. Pengusaha juga mengakui bahwa kondisi ekonomi sangat mendukung perkembangan usaha mereka. Dari sisi politik, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung investasi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan kemudahan yang diberikan kepada investor. Namun, dari sisi sosial, masih terdapat resistensi dari masyarakat, terutama terkait dampak lingkungan. Masyarakat pesisir mengkhawatirkan pencemaran laut dan berkurangnya akses terhadap sumber daya perikanan.

Kondisi ekonomi sangat mendukung karena sektor perikanan merupakan unggulan di Kota Bitung. Secara sosial, masyarakat cukup terbuka terhadap investasi, meskipun masih ada kekhawatiran terkait dampak lingkungan. Dari sisi politik, pemerintah daerah sangat mendukung kebijakan investasi ini melalui berbagai regulasi dan kemudahan perizinan. Dilihat dari perkembangannya, Ekonomi Kota Bitung pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang dinamis dengan sempat mencatat angka tertinggi di Sulawesi Utara pada triwulan II-2025 (7,44%) sebelum melemah ke 6,56% pada triwulan III-2025. Industri perikanan dan kelapa di KEK Bitung menjadi pendorong utama, meski dihadapkan pada tantangan peningkatan ketidacukupan pangan sebesar 4,2%. Kondisi sosial dan politik Kota Bitung pada tahun 2025 ditandai dengan transisi kepemimpinan baru hasil pemilihan, fokus pada stabilitas ekonomi pasca-pandemi. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, kondisi sosial merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Ketidaksiapan masyarakat dalam menerima kebijakan dapat menjadi hambatan serius.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya memperhatikan aspek sosial. Kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat menyebabkan munculnya persepsi negatif terhadap investasi. Dengan demikian, meskipun kondisi ekonomi dan politik mendukung, namun kondisi sosial menjadi variabel kritis yang menghambat implementasi kebijakan.

Komunikasi Antar Organisasi

Kebijakan komunikasi antar organisasi berfokus pada pertukaran informasi, koordinasi, dan ketergantungan antar unit atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan yang dinamis. Kebijakan ini menekankan pentingnya struktur yang menghubungkan unit (seperti *linking pin model*), aliran informasi vertikal/horizontal yang transparan, serta penggunaan teknologi untuk efisiensi dan adaptasi, guna meminimalisir konflik dan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan.

Komunikasi antar organisasi merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar instansi sudah dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti koordinasi lintas sektor dan penggunaan sistem OSS.

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam komunikasi, antara lain:

- Keterlambatan penyampaian informasi
- Kurangnya sinkronisasi antar instansi
- Miskomunikasi dalam proses perizinan

Pelaku usaha juga mengeluhkan bahwa informasi terkait kebijakan tidak selalu diterima secara cepat dan jelas. Hal ini berdampak pada ketidakpastian dalam menjalankan usaha. Dalam menjalankan usaha mereka harus melewati beberapa fase koordinasi seperti pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, meskipun sekarang berbasis online, namun keluhan yang sering dikeluhkan adalah lambatnya respon dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga mereka sering mencari 'orang dalam' atau koneksi untuk mempercepat layanan perizinan di Tingkat provinsi dan pusat.

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang efektif sangat penting untuk menghindari distorsi informasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan optimal meskipun ditingkat local atau kota bitung sudah baik namun kebijakan investasi dan perizinan usaha khususnya dibidang perikanan harus melibatkan pemerintah Tingkat provinsi dan pusat yang memperlambat proses pekerjaan pengusaha, sehingga menghambat implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan adanya fragmentasi birokrasi, di mana masing-masing instansi belum sepenuhnya

terintegrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, komunikasi antar organisasi dapat dikategorikan sebagai faktor yang masih perlu diperbaiki dalam implementasi kebijakan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana (implementor) berfokus pada sifat, komitmen, dan kapasitas aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan publik. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kompetensi, kejujuran, responsivitas, dan integritas aktor pelaksana, serta didukung oleh struktur organisasi, standar prosedur operasional (SOP), dan pola hubungan birokrasi yang baik

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma, dan kapasitas organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pemerintah memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kebijakan. Aparatur bekerja berdasarkan SOP dan berusaha memberikan pelayanan yang optimal kepada investor. Dari hasil wawancara karakteristik pelaksana sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha menilai bahwa pelayanan pemerintah sudah cukup baik, tetapi masih terdapat kendala dalam kecepatan dan efisiensi pelayanan khususnya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, karakteristik agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Aparatur yang kompeten dan profesional akan meningkatkan efektivitas kebijakan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aparat memiliki sikap yang baik, namun kapasitas kelembagaan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, karakteristik agen pelaksana dapat dikategorikan sebagai cukup mendukung, tetapi belum optimal.

Disposisi Implementor

Disposisi implementor mencerminkan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan terhadap kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementor memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan investasi. Aparatur pemerintah mendukung penuh kebijakan dan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada investor. Hal ini juga diakui oleh pelaku usaha yang merasakan adanya kemudahan dalam berinvestasi. Namun demikian, sikap positif ini belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan teknis dan dukungan sistem yang memadai. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, disposisi implementor merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Sikap yang positif akan mendorong keberhasilan kebijakan, namun harus didukung oleh faktor lain. Dengan demikian, disposisi implementor dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung utama, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada variabel lain.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan investasi perikanan dan kelautan di Kota Bitung secara normatif telah dirumuskan dengan jelas dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara kejelasan kebijakan dengan pemahaman masyarakat, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh stakeholder.
2. Sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan masih belum memadai, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Keterbatasan kompetensi teknis aparat, kurangnya tenaga kerja terampil, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik menunjukkan bahwa secara ekonomi dan politik kebijakan ini didukung oleh potensi daerah dan komitmen pemerintah. Namun, dari sisi sosial masih terdapat resistensi masyarakat, terutama terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial belum sepenuhnya dikelola secara optimal.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

383

Indexed



SINTA 4



4. Komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai mekanisme koordinasi, namun belum berjalan secara efektif. Masih terdapat kendala berupa keterlambatan informasi, kurangnya sinkronisasi antar instansi, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.
5. Karakteristik agen pelaksana menunjukkan bahwa aparatur pemerintah memiliki komitmen yang baik dan bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, kapasitas teknis dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif.
6. Disposisi implementor merupakan faktor yang paling mendukung dalam implementasi kebijakan ini. Aparatur pemerintah menunjukkan sikap yang positif, responsif, dan mendukung investasi. Namun demikian, sikap tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas dan sistem yang memadai

REFERENSI

- Agustino, Leo, (2017), Dasar – Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Boone, Kurtz. (2012). Principles of Contemporary Marketing 15th Edition, South-. Western : Cengage learning
- Grista Hillary Bawotong. 2024. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Ikan Cakalang Dalam Meningkatkan Perekonomian Oleh Dinas Perikanan Di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal IPDN Kementerian Dalam Negeri
- Grindel, Merille .S (ed). 1980 . Politics and Policy Implementation and Public Policy in the trird World. New Jersey: Princenton University Press.
- Jogiyanto. 2013. “Teori Portofolio dan Analisis Investasi”, BPFE. Yogyakarta, Edisi Kedelapan, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2010, Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan, Jakarta: Erlangga
- Lisa I.A. Lebang dkk. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bitung. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Vol. 4 Nomor 17 tahun 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jpekd/article/view/15778><https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jpekd/article/view/15778>
- Madura, 2011,. Introduction to Businessl, Pengantar Bisnis, Penerbit Salemba edisi (4)
- Manoppo R. Pati A, Kimbal A. 2020. Implementasi Kebijakan Bela Negara Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Wilayah Komando Distrik Militer 1309 / Manado. Jurnal Agri Moleong, J. L.. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.Sosioekonomi. Unsrat
- Marwiyah, Siti, 2022. “Kebijakan Publik” (t.p.). <http://repository.upm.ac.id/3995/1/BUKU%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%202022..>
- Moleong. Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. AR. 2013. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Cetakan Pertama. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.Mochtar Mas’ud dan Colin MacAndrews. 2001. Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ponto, A. C., Tamowangkay, V., & Tulung, T. (2023). Implementasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung Dalam Meningkatkan Potensi Investasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. JURNAL EKSEKUTIF, 3(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/48081>
- Sadono. (2009). Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Adminsistrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.Framework” Administration Society. Vol. 6 No. 4 February 1975.
- Siahaan, Marihot Pahala (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi. Revisi, Jakarta: PT. Raja

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

Grafindo

Salvatore, D. (2015). Ekonomi Manajerial Dalam Perekonomian Global.

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. 2014. Edisi 20. Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga

Sondang P. Siagian. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV

Syahnur S dkk 2013. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya. Repository FE UNJ

Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi pertama. Yogyakarta : Kanisius

Wahab A.2007. Analisis Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa S. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT Raja Grafindo Prasada

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

385

